



Media: Tribun Jogja

Hari: Rabu

Tanggal: 08 Maret 2017

Halaman: 13

DPRD Janji Selesaikan Raperda

KALANGAN legislatif berkomitmen untuk merampungkan pembahasan Raperda disabilitas. Saat ini dalam pembahasan Raperda masih tinggal lima pasal yang belum dibahas.

Usai pembahasan di Pansus, Raperda ini pun bukan berarti bisa langsung disahkan, karena harus melalui uji publik, finalisasi dan fasilitasi di Pemda DIY sebelum disahkan bersama Pemerintah Kota (Pemkot) setempat.

"Kami mengapresiasi aksi dari Forum Penguatan Hak Penyandang Disabilitas Kota Yoga yang ikut mengawal pembahasan Raperda. Kami punya komitmen untuk menyelesaikan Raperda tersebut," ujar Wakil Ketua DPRD setempat, M Ali Fahmi, Selasa (7/3).

● ke halaman 14

2015

- Raperda tersebut sudah dibahas tahun 2015 tapi sampai saat ini belum juga disahkan.
- Kota Yoga menjadi satu-satunya wilayah di DIY yang belum memiliki Perda Perlindungan Disabilitas.
- Penundaan pengesahan raperda itu disinyalir karena penyesuaian naskah akademik dengan UU Nomor 8 tahun 2016.
- Sejumlah fasilitas layanan publik di Kota Yoga juga belum ramah bagi kaum difabel.
- Seperti belum semua toko memiliki jalur khusus akses bagi penyandang disabilitas.
- Begitu pula soal pekerjaan. Akses kaum difabel untuk memiliki pekerjaan di sektor publik masih minim.
- Perda ini nantinya diharapkan menjadi payung hukum melindungi hak-hak kaum difabel di bidang pendidikan, kriminalitas, dan pekerjaan.
- Penyandang disabilitas masih merasakan hambatan mengakses layanan pendidikan dan kesehatan.

2016

DPRD Janji Selesaikan Raperda

● Sambungan Hal 13

Dia mengatakan, pembahasan Raperda harus menyesuaikan aturan. Hal ini karena ada perbedaan dengan turunnnya UU nomor 8 tahun 2016 pada Mei 2016. Dia berharap agar pembahasan Raperda ini bisa segera selesai dilaksanakan.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga mengakui jika pelayanan bagi penyandang disabilitas, dari sisi kualitas masih kurang. Dia berharap nantinya akan lebih terakomodasi hak-hak penyandang disabilitas baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya.

Diani Anindiati, anggota Panitia Khusus (Pansus) Raperda Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas menegaskan, untuk menyusun raperda, pihaknya mengadopsi masukan naskah akademik dari forum penyandang disabilitas. Pihaknya juga mengatakan, untuk pembahasan ini tidak mengejar selesainya saja, namun juga cermat.

"Ada kesan molor. Namun, kami berprinsip hati-hati jangan sampai ada hak-hak disabilitas terlewat dengan adanya Perda nantinya," tegasnya. (als)

Negatif | Amat Segera | Untuk Ditangani

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005